

## **WE BELIEVE IN SECOND CHANGE**

### **“PROTEIN HEWANI UNTUK PERUBAHAN NEGERI SERIBU PULAU”**

Maluku, merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki berbagai potensi sumber daya alam (SDA). Negeri seribu pulau, pulau rempah - rempah merupakan dua dari banyak sebutan yang diperoleh negeri ini terkait betapa banyak potensi sumber daya alam (SDA) yang dimiliki serta dapat dikembangkan. Rempah – rempah (pala cengkeh) dan hasil laut (cakalang, mutiara dan tuna) merupakan produk utama kepulauan Maluku sampai saat ini namun untuk menunjang perkembangan era industri dan bertambahnya jumlah penduduk Maluku ada satu sektor yang memiliki potensi sangat besar dan dapat dikembangkan yaitu sektor peternakan sebagai industri pemenuhan kebutuhan protein hewani.

Dalam pengembangannya, Maluku merupakan salah satu wilayah yang terpilih dalam program *food estate* yang dicanangkan pemerintah dimana apabila program ini berjalan, berhasil dan berkesinambungan maka dampak utama yang dapat dirasakan ialah naiknya pertumbuhan sektor ekonomi di wilayah Maluku dan pengembangan wilayah sebagai wilayah cadangan pangan terutama Indonesia Timur. Maluku sendiri telah menetapkan beberapa wilayah sebagai tempat pengembangan sektor *food estate* diantaranya yaitu pulau Buru dan pulau Seram. Hal utama yang dapat mendukung pengembangan sektor industri peternakan di wilayah Maluku antara lain ialah (1) Kondisi geografis dan topografi wilayah yang sesuai dengan kondisi ideal pengembangan peternakan. Maluku memiliki wilayah lahan basah dan lahan kering yang cocok dan dapat digunakan sebagai tempat pembiakan suplay bahan pakan lokal seperti jagung, sorghum, lamtoro, gabah dan lain – lain, perbukitan rendah sampai pegunungan tinggi dimana kontur wilayah ini sangat cocok untuk berbagai pengembangan industri peternakan seperti industri peternakan ayam petelur, industri ayam pedaging, industri penggemukan kelinci, sapi, domba, kambing dan kerbau (2) Lokasi strategis dimana wilayah Maluku merupakan titik transit perdagangan berbagai daerah di

Indonesia Timur. Lokasi strategis ini sangat menguntungkan apabila dimanfaatkan dengan baik dan terkelola.

Dalam proses industrialisasi untuk pengembangan daerah diperlukan peran andil berbagai kalangan. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 06 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Peternak dijelaskan bahwa; Dalam pemberdayaan peternak diperlukan adanya kawasan usaha peternakan untuk menjamin kepastian usaha budidaya ternak dengan kawasan yang dimaksud adalah kawasan agropolitan. Berdasarkan hal tersebut dan kondisi yang dimiliki wilayah kepulauan Maluku maka usaha yang dilakukan untuk membangun kawasan industri peternakan sudah sesuai dan dapat dilakukan. Dalam pengembangan industri dan pengelolaannya Maluku memiliki Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yaitu PT Maluku Energi Abadi (Perseroda) yang disingkat PT MEA yang disiapkan untuk mengelola sumber daya alam dengan potensi terbaik di wilayah Maluku.

Dengan tersedianya sumber daya alam yang mendukung dan ditopang oleh sumber daya manusia yang memadai prospek pengembangan sektor industri peternakan di wilayah Maluku akan berjalan baik dan berkembang. Beberapa manfaat yang akan dirasakan apabila sektor industri peternakan di wilayah Maluku dapat dikembangkan yaitu antara lain (1) Terbukanya lebih banyak lapangan pekerjaan di wilayah Maluku. Menurut data dari Badan Pusat Statistik pada Agustus 2021 saja masih lebih dari 50.000 orang di Maluku yang termasuk angkatan kerja menganggur atau tidak bekerja hal ini mengisyaratkan apabila terbukanya industri peternakan di wilayah Maluku maka akan lebih banyak tenaga kerja yang terserap. (2) Peningkatan ekonomi keluarga atau penduduk wilayah Maluku. Ketika kegiatan perindustrian telah berjalan pada wilayah Maluku dan menyerap banyak tenaga kerja di berbagai bidang baik secara spesifik dibidang peternakan atau secara umum dibidang lainnya sudah pasti pertumbuhan ekonomi wilayah akan menjadi cukup baik dan ketika ini terjadi akan mempengaruhi peningkatan ekonomi penduduk secara spesifik karena pendapatan penduduk meningkat. (3) Terbukanya sektor industri lain. Apabila sektor industri peternakan telah dijalankan dengan baik maka industri lain juga akan terbangun dengan sendirinya semisal industri bahan baku bangunan dimana Maluku juga memiliki

banyak wilayah dengan kandungan mineral yang tinggi yang masih belum dikelola. Industri utama lain yang mendukung ialah terbukanya sektor industri ekspor dan impor dimana dalam beberapa program yang diajukan pemerintah Indonesia mendukung kegiatan ekspor atau swasembada daging keluar wilayah Indonesia. (4) Pertumbuhan ekonomi nasional. Keberhasilan dalam mengelola suatu wilayah yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang baik maka secara langsung akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional,

Guna mewujudkan harapan itu, sinergi antar lembaga baik pemerintah, asosiasi, dan swasta dibutuhkan untuk bersama-sama merencanakan, mengawasi, meneliti serta mengevaluasi dalam upaya pembangunan sektor ekonomi industri peternakan. Pemerintah tidak bisa bergerak sendiri tanpa ada bantuan pihak terkait. Arah kebijakan yang pro rakyat akan sangat diapresiasi apabila berguna dan tepat sasaran. Sehingga melalui kebijakan itu bisa saja menjadi peluang besar untuk mampu mengeksport produk hasil negeri sendiri yang akan berdampak kepada kesejahteraan masyarakat.

Kokohnya suatu negara akan dilihat dari seberapa besar kekuatan ekonomi yang dibangun untuk menunjang ketahanan pangan nasionalnya seperti yang menjadi jargon politik pemerintah saat ini. Tentu saja, hal itu bukan pekerjaan yang gampang untuk dilakukan. Butuh perencanaan yang matang, anggaran yang efisien, koordinasi dan komunikasi pemerintah pusat dan daerah, pelaksanaan lapangan, dan pengawasan yang terintegrasi dengan evaluasi kerja. Jika jargon ini terimplementasi diharapkan pembangunan sektor industri ekonomi peternakan lebih maju dan produktif sehingga Indonesia bisa mengeliminir ketergantungan ke negara lain yang pada akhirnya kedaulatan dan ketahanan pangan Indonesia yang menjadi impian mulia pemerintah bisa benar-bener terwujud.

Penulis : Ilham Akbar Maulana